

Katalog: 4401002.91

ISSN 2654-9891



STATISTIK KRIMINAL PROVINSI PAPUA BARAT 2023

Volume 10, 2024

Katalog: 4401002.91

ISSN 2654-9891

<https://papuabarat.bps.go.id>

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI PAPUA BARAT 2023

Volume 10, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI PAPUA BARAT

2023

Volume 10, 2024

Katalog : 4401002.91
ISSN : 2654-9891
Nomor Publikasi : 91000.24050

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi+52 halaman

Penyusun Naskah:
BPS Provinsi Papua Barat

Penyunting:
BPS Provinsi Papua Barat

Pembuat Kover:
BPS Provinsi Papua Barat

Penerbit:
© Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Dicetak Oleh:
CV. Tintur Jaya

Sumber Ilustrasi:
freepic.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Papua Barat.

Tim Penyusun

Statistik Kriminal **Provinsi Papua Barat 2023**

Volume 10, 2024

Pengarah:

Ir. Merry MP

Penanggung Jawab:

Ika Rusinta Widiyasari, S.ST., M.PP

Penyunting:

Fadel Fahroni, SST

Penulis:

Abthal Umar, S.Tr.Stat.

Pengolah Data:

Abthal Umar, S.Tr.Stat.

Fadel Fahroni, SST

Gambar Kulit dan Infografis:

Fadel Fahroni, SST

Penata Letak:

Abthal Umar, S.Tr.Stat.

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2023 ini merupakan edisi kesembilan yang menyajikan data dan informasi terkait keamanan dan kriminalitas yang terjadi di Papua Barat.

Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat dan Polres/Polresta se-Papua Barat. Selain itu, beberapa data pendukung lainnya diperoleh dari kegiatan Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021 yang diselenggarakan oleh BPS. Data dari kepolisian menggambarkan situasi keamanan yang diindikasikan dari banyaknya kejadian kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian. Sementara itu, data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari aparat desa setempat.

Akhir kata, kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan terutama pembangunan di bidang keamanan. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu berbagai masukan, kritik, dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Manokwari, Oktober 2024

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Papua Barat



Ir. Merry, M.P.

Ringkasan Eksekutif



Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2023 menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Provinsi Papua Barat pada tahun 2023. Informasi yang disajikan mencakup dua pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku (Data Registrasi Kepolisian) dan pendekatan kewilayahan (Pendataan Potensi Desa/Podes).

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mencatat bahwa selama periode 2014 – 2023 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas (*crime total*) di Papua Barat berjalan fluktuatif. *Crime total* pada tahun 2013 sebanyak 2.039 kejadian kejahatan dan mengalami peningkatan tajam pada tahun 2016 menjadi 3.621 kejadian lalu menurun tajam lagi menjadi 2.684 kejadian kejahatan pada tahun 2021 kemudian kembali meningkat menjadi 6.410 kasus pada tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat risiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk (*crime rate*) di Papua Barat juga fluktuatif. Selama periode 2022 – 2023, *crime rate* tercatat meningkat sebesar 6,57 persen (atau dari 289 pada tahun 2022 menjadi 308 pada tahun 2023). Hal ini sekaligus menempatkan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tindak kejahatan paling tinggi di Indonesia.

Berikutnya, statistik keamanan dengan pendekatan kewilayahan dicerminkan dari data jumlah perkelahian massal yang terjadi di wilayah desa/kelurahan. Data Podes mencatat persentase desa/kelurahan di Provinsi Papua Barat yang pernah mengalami konflik massal cenderung meningkat selama

periode 2019 – 2021. Pada tahun 2019, persentasenya tercatat sebesar 3,22 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, persentase desa/kelurahan dengan perkelahian massal turun menjadi 3,77 persen. Kedua pendekatan dalam statistik kriminal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang keamanan di Provinsi Papua Barat.

<https://papuabarat.bps.go.id>



Daftar Isi

Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2023

Volume 10, 2024

Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
Pendahuluan	3
Latar Belakang	3
Tujuan.....	5
Ruang Lingkup.....	5
Sistematika Penyajian	6
Kejadian Kejahatan	9
Angka Kejahatan secara umum di Papua Barat.....	9
Angka Kejahatan secara Nasional.....	13
Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi.....	13
Konflik Massal.....	18
Penyelesaian Tindak Kejahatan	20
Upaya Menjaga Keamanan	22
Daftar Pustaka	25
Catatan Teknis	27
Lampiran	33

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
Gambar 1 <i>Crime Total</i> dan <i>Crime Rate</i> Provinsi Papua Barat, 2014-2023	11
Gambar 2 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan menurut Kabupaten/Kota, 2023	11
Gambar 3 Persentase Kejahatan yang Dapat Diselesaikan oleh Kepolisian menurut Kabupaten/Kota, 2023.....	12
Gambar 4 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang di Papua Barat, 2023.....	17
Gambar 5 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal di Provinsi Papua Barat, 2019-2021	19
Gambar 6 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021	20
Gambar 7 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Inisiator Penyelesaian Konflik Massal di Provinsi Papua Barat, 2021	21
Gambar 8 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021	22

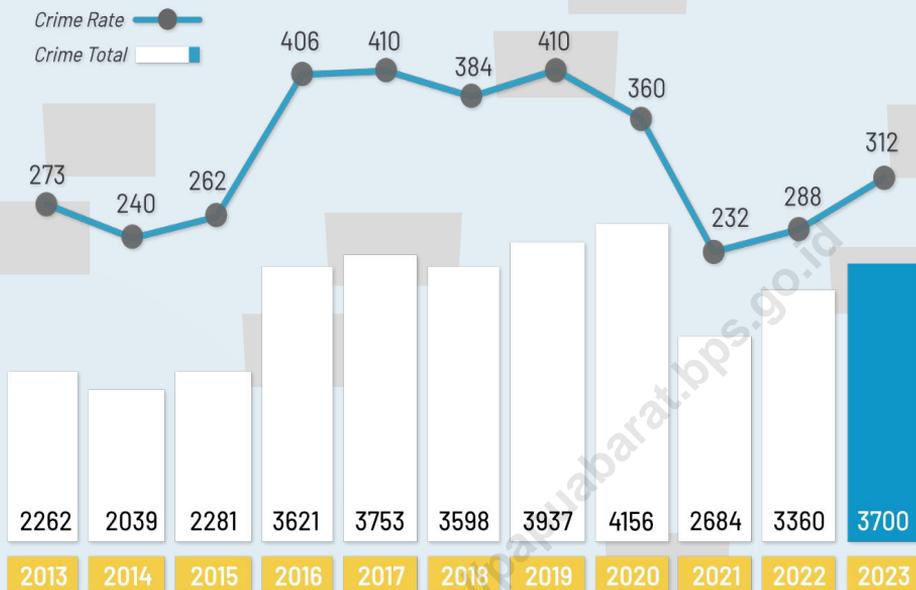
Daftar Lampiran

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Jumlah Tindak Pidana (<i>Crime Total</i>) di Papua Barat, 2020 - 2023	33
Lampiran 2 Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan di Papua Barat, 2020 - 2023	34
Lampiran 3 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearence Rate</i>) di Papua Barat, 2020 - 2023	35
Lampiran 4 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat, 2023	36
Lampiran 5 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Fakfak, 2023	37
Lampiran 6 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Kaimana, 2023	38
Lampiran 7 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Teluk Wondama, 2023	39
Lampiran 8 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Teluk Bintuni, 2023	40
Lampiran 9 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Manokwari, 2023	41
Lampiran 10 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Sorong Selatan, 2023	42
Lampiran 11 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Sorong, 2023	43

Lampiran	Halaman
Lampiran 12 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Raja Ampat, 2023	44
Lampiran 13 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Tambrauw, 2023	45
Lampiran 14 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Maybrat, 2023	46
Lampiran 15 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Manokwari Selatan, 2023.....	47
Lampiran 16 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kota Sorong, 2023	48
Lampiran 17 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Polda Papua Barat, 2023	49
Lampiran 18 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Perkelahian Massal di Wilayahnya di Papua Barat, 2021.....	50
Lampiran 19 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dan Kabupaten/Kota, 2021	51
Lampiran 20 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2021.	52

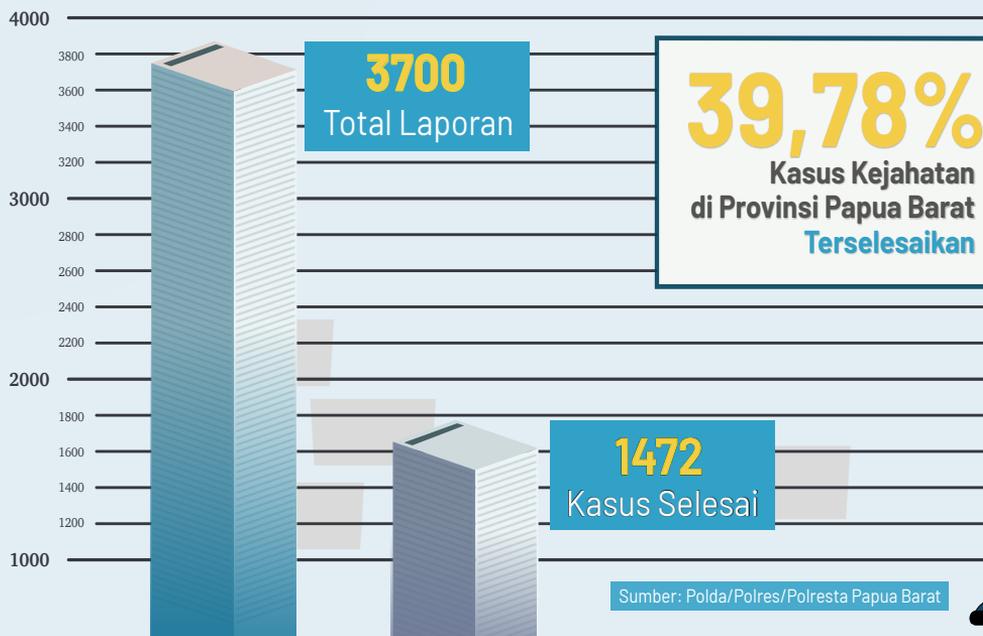
INDIKATOR KUNCI STATISTIK KRIMINAL PROVINSI PAPUA BARAT, 2023

Tren *Crime Total* dan *Crime Rate* Provinsi Papua Barat, 2013-2023



Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Jumlah Kejadian Kejahatan Tahun 2022



Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat





Bagian 1



Pendahuluan

Pendahuluan

Latar Belakang

Kebutuhan dasar setiap manusia bukan hanya terbatas pada kebutuhan fisik/biologis, namun juga mencakup kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan rasa aman. Saat ini kebutuhan akan rasa aman menjadi kebutuhan fundamental dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut Abraham Maslow (1943) dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua setelah kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, papan). Hal ini menegaskan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting.

Negara secara eksplisit menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "... Pemerintah dan Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," Penegasan bahwa rasa aman adalah salah satu hak asasi manusia juga tertuang dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Selain itu, di dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Walaupun negara dan pemerintah sudah melindungi dan menjamin keamanan bagi setiap warga negara, tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat berdampak langsung dalam memberikan rasa aman bagi warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dari kejadian kriminal yang marak terjadi di masyarakat. Sementara itu, perkembangan tingkat kriminal itu sendiri sangatlah sulit untuk diukur. Statistik dan indikator yang disajikan pun merupakan indikator negatif, seperti misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas/jumlah kejahatan di suatu wilayah mengindikasikan semakin rendahnya kondisi keamanan di wilayah tersebut.

Upaya memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan bagian integral dari proses pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan di masyarakat akan membangun suasana kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 sejak pandemi Covid-19 dimana tingkat penyebarannya sudah mulai terkendali di wilayah Papua Barat. Tahun ini merupakan tahun pemulihan awal sektor ekonomi dan sektor-sektor esensial lainnya. Angka pengangguran dan kemiskinan pun tercatat mulai menurun. Dengan penyusunan publikasi Statistik Kriminal tahun 2023 ini diharapkan dapat diperoleh gambaran umum mengenai kondisi keamanan di Papua Barat selama 2023. Selanjutnya diharapkan bahwa publikasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan keamanan bagi semua.

Tujuan

Penulisan publikasi Statistik Kriminal 2023 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini masyarakat di Provinsi Papua Barat serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga menguraikan tentang jenis kejahatan serta kejadian perkelahian massal yang terjadi, untuk memperkaya data dan informasi mengenai kondisi keamanan di Provinsi Papua Barat.

Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat ini menyajikan data dan informasi tentang kejadian kejahatan yang terjadi di Provinsi Papua Barat dan juga tingkat kabupaten/kota, khususnya yang terjadi pada tahun 2023. Selain itu, untuk memperoleh gambaran perkembangan antar tahun, tren perkembangan beberapa karakteristik juga disajikan dalam publikasi ini. Variabel tersebut meliputi jumlah tindakan pidana dan jumlah penyelesaian kejahatan.

Sumber data utama publikasi ini diperoleh dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat. Selain itu, data jumlah kejahatan menurut jenisnya juga dikumpulkan dari seluruh Polres/Polresta yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Papua Barat. Sebagai catatan, total agregasi jenis kejahatan di Papua

Barat bisa berbeda antara data dari Polda dan total agregasi dari kabupaten/kota.

Satu hal yang menjadi kendala dalam penyusunan publikasi ini adalah data keamanan belum tersedia dengan baik terutama pada kabupaten pemekaran. Umumnya, Polres pada kabupaten pemekaran baru dibentuk pada pertengahan tahun 2022 sehingga pencatatan data keamanan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, statistik dan indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya mencakup dua belas kabupaten/kota di Papua Barat, yaitu Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrau, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong. Khusus untuk Kabupaten Tambrau dan Manokwari Selatan yang merupakan kabupaten pemekaran, data keamanan untuk kabupaten tersebut sudah tersedia dengan baik. Sedangkan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, data keamanan belum dapat diperoleh sehingga data keamanan pada kabupaten ini belum dapat ditampilkan dalam publikasi ini.

Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam dua bagian (Bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penulisan publikasi. Bab II menyajikan gambaran umum kejadian kejahatan yang bersumber dari data Polda/Polres/Polresta, termasuk juga kejadian konflik massal yang bersumber data dari Podes 2021. Di bagian akhir publikasi juga dilengkapi dengan catatan teknis yang menjelaskan metodologi, konsep dan definisi, serta penjelasan mengenai statistik/indikator yang digunakan dalam publikasi ini. Selanjutnya, daftar pustaka dan tabel lampiran disajikan pada bagian paling akhir dari publikasi ini.



Bagian 2

KEJADIAN
KEJAHATAN

Kejadian Kejahatan

Angka Kejahatan secara umum di Papua Barat

Indikator pertama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan di suatu wilayah adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam penghitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

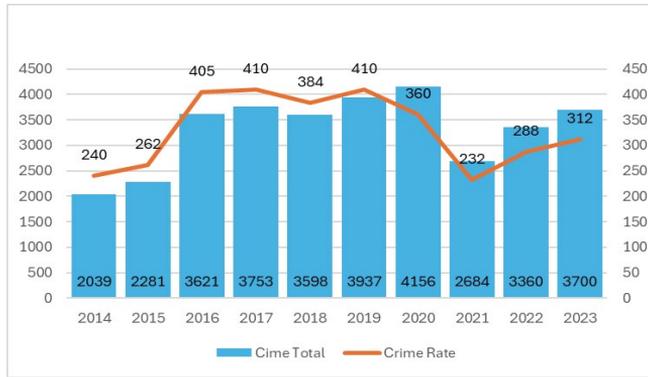
Gambar 1 di bawah ini menyajikan tren jumlah kejahatan (*crime total*) di Papua Barat dari 2014 hingga 2023. Selama periode tersebut umumnya perkembangan jumlah kejahatan di Provinsi Papua Barat menunjukkan tren fluktuatif dan terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 kemudian meningkat lagi pada tahun 2023. Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mencatat bahwa dalam kurun waktu 9 tahun terakhir (2014 – 2022), laju peningkatan tindak pidana di Papua Barat meningkat 65 persen. Pada tahun 2014 jumlah kriminalitas di Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 2.039 kasus. Sementara itu, pada tahun 2020 jumlahnya meningkat signifikan menjadi 4.156 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kejahatan kembali menurun drastis menjadi 2.684 kasus disebabkan oleh pandemi Covid 19 dimana dikeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga masyarakat cenderung di rumah. Kemudian pada tahun 2023, jumlah kejahatan k

embali meningkat menjadi 3.700 kasus seiring dengan pemulihan Covid-19 dimana masyarakat sudah mulai beraktivitas di luar rumah.

Sejalan dengan indikator jumlah kejahatan di atas, tingkat kejahatan (*crime rate*) di Papua Barat umumnya juga meningkat. *Crime rate* merupakan sebuah indikator yang mencerminkan risiko penduduk terkena tindak kejahatan. Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan tingkat kerawanan kejahatan suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

Pada tahun 2014 tercatat angka *crime rate* sebesar 240, kemudian pada tahun 2016 meningkat signifikan menjadi 405. Hal ini berarti tingkat risiko penduduk menjadi korban kejahatan di Papua Barat semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan angka nasional, tingkat risiko kejahatan pada tahun 2017 hingga 2019 tercatat pada kisaran nilai 115. Risiko ini hampir empat kali lebih rendah dibanding risiko kejahatan yang terjadi di Papua Barat. Statistik ini sekaligus memberikan informasi perlunya kebijakan-kebijakan di bidang keamanan yang dapat menekan risiko kejahatan yang dialami penduduk di Provinsi Papua Barat.

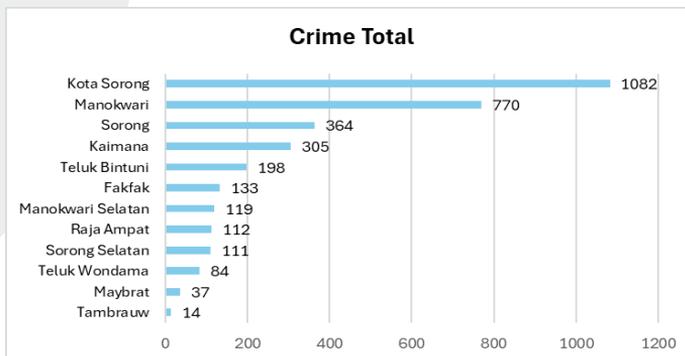
Hal unik yang terjadi pada tahun 2021 adalah jumlah kejahatan dan *crime rate* sama-sama turun tajam bahkan lebih rendah daripada tahun 2016. Pada tahun 2023, *crime rate* kembali meningkat menjadi 312. Memaknai statistik keamanan tidak cukup dari satu sisi, melainkan juga harus diperkaya dari indikator terkait lainnya. Pandemi Covid-19 yang mulai berangsur pulih di tahun 2023 memberi pengaruh pada keamanan di Provinsi Papua Barat. Gambaran total kejahatan dan tingkat kejahatan di Papua Barat dari tahun 2014 hingga 2023 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: Polda/Polres/Polresta se-Papua Barat

Gambar 1 *Crime Total* dan *Crime Rate* Provinsi Papua Barat, 2014-2023

Selanjutnya jika dirinci menurut kabupaten/kota, umumnya jumlah tindak pidana sebanding dengan jumlah penduduknya. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tindak kejahatan yang terjadi. Hal ini terlihat dari jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2023. Total kejahatan yang dilaporkan ke Polres Kota Sorong tercatat sebanyak 1.082 kasus hal ini sebanding dengan jumlah penduduk terbesar di Papua Barat. Sementara itu, kabupaten Manokwari menempati posisi ke dua dengan *crime total* tertinggi di Papua Barat dengan kasus kejahatan tercatat sebanyak 770 kasus. Di sisi lain, kriminalitas paling rendah terjadi di kabupaten Tambrauw yaitu sebanyak 14 kasus.

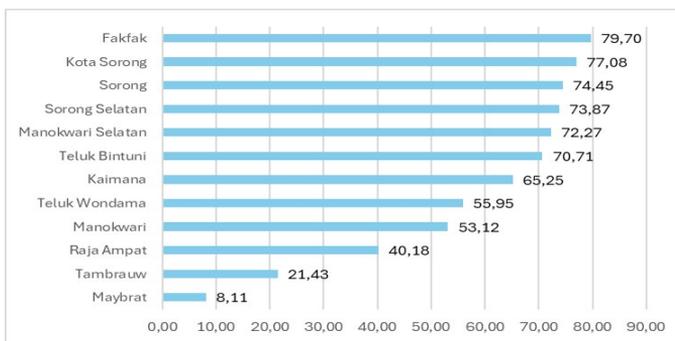


Sumber: Polres/Polresta se-Papua Barat

Gambar 2 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan menurut Kabupaten/Kota, 2023

Perlu kehati-hatian dalam memaknai statistik di atas. Hal ini karena jumlah tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah kabupaten/kota dihitung melalui pendekatan pelaporan dan kasus yang ditangani kantor kepolisian setempat. Untuk kasus-kasus pidana dimana aparat kepolisian tidak hadir untuk menangani perkara maupun penduduk yang tidak melaporkan tindak kejahatan, maka jumlah kasusnya pun cenderung tidak tercakup. Inilah salah satu kelemahan dalam penyajian data statistik keamanan, karena seringkali data yang ditampilkan tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan. Namun di atas itu semua, data yang diperoleh dari kepolisian tetap dapat dijadikan rujukan dalam mengevaluasi serta merencanakan pembangunan dalam bidang keamanan.

Sementara itu, jika ditinjau dari persentase kasus yang dapat diselesaikan pada tahun 2023, Kabupaten Fakfak menempati urutan pertama dengan persentase penyelesaian kasus sebesar 79,70 persen. Menyusul berikutnya adalah Kota Sorong sebesar 77,08 persen dan Kabupaten Sorong memiliki *clearance rate* masing-masing sebesar 74,45 persen. Di sisi lain masih terdapat lima kabupaten dimana *clearance rate* masih di bawah 60 dengan persentase terkecil adalah Kabupaten Maybrat dengan persentase sebesar 8,11 persen.



Sumber: Polres/Polresta se-Papua Barat

Gambar 3 Persentase Kejahatan yang Dapat Diselesaikan oleh Kepolisian menurut Kabupaten/Kota, 2022

Angka Kejahatan secara Nasional

Tingkat risiko kejadian kejahatan di suatu wilayah tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan. Berdasarkan Publikasi Statistik Kriminal 2023 (BPS, 2023) yang menyajikan data statistik keamanan secara nasional dari seluruh provinsi di Indonesia, diketahui bahwa pada tahun 2022 Papua Barat menempati urutan ke-23 jumlah tindak kejahatan diantara provinsi-provinsi lainnya. Dengan kata lain, jumlah tindak kejahatan di Papua Barat tergolong rendah. Namun demikian, ternyata tingkat risiko terkena kejahatan di Papua Barat justru menempati urutan kedua tertinggi di Indonesia dengan *crime rate* sebesar 353 pada tahun 2022. Sementara itu, Provinsi Banten tercatat memiliki tingkat risiko terkecil yaitu sebesar 42. Artinya, penduduk Papua Barat 8-9 kali lipat lebih rawan menjadi korban kejahatan dibanding penduduk Banten.

Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi

Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Publikasi ini mengelompokkan jenis kejahatan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, negara, dan sebagainya).
2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).

3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/ milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/ barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)* yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*)(UNODC, 2015).

Tabel 1 Klasifikasi kejahatan

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
(1)	(2)	(3)
1	Kejahatan terhadap Nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/ Badan	Penganiayaan Berat
		Penganiayaan Ringan
		Kekerasan dalam Rumah Tangga
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	Perkosaan
		Pencabulan
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	Penculikan
		Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang dengan Penggunaan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan
		Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)
		Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
(1)	(2)	(3)
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang	Pencurian Pencurian dengan pemberatan Pencurian Kendaraan Bermotor Pengrusakan/Penghancuran Barang Pembakaran dengan Sengaja Penadahan
7	Kejahatan Terkait Narkotika	Narkotika dan Psikotropika
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Penipuan/Perbuatan Curang Penggelapan Korupsi
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	Terhadap Ketertiban Umum

Pertama, Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu juga merupakan kejahatan yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia. Jumlah kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang. Selama tahun 2023 terjadi 11 kejadian pembunuhan di Papua Barat.

Selanjutnya, kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) pada

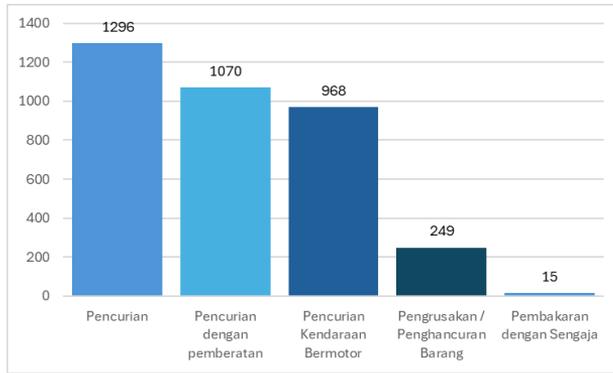
2023 secara total terjadi sebanyak 745 kejadian, dimana mayoritas merupakan penganiayaan ringan (475 kejadian). Sementara itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penganiayaan berat tercatat masing-masing sebesar 108 dan 162 kejadian.

Ketiga, kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Papua Barat tercatat sebanyak 58 kasus, yakni perkosaan sebanyak 26 kejadian dan 32 kejadian pencabulan.

Keempat, klasifikasi kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang merupakan jenis kejahatan penculikan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang berupa Penculikan tahun 2023 sebanyak 1 kejadian.

Kelima, kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan. Jenis kejahatan ini secara hierarki tergolong tinggi karena selain menyangkut kejahatan terhadap properti juga merupakan kejahatan terhadap fisik. Yang termasuk dalam kejahatan ini adalah adalah Pencurian dengan Kekerasan. Pada tahun 2023 terjadi sebanyak 93 kejadian pencurian dengan kekerasan.

Kelompok kejahatan berikutnya adalah kejahatan terhadap hak milik/barang. Kejadian kejahatan pencurian tanpa penggunaan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak jumlahnya setiap tahunnya. Kejahatan ini didominasi oleh kejahatan pencurian dengan jumlah kasus sebanyak 1.291 kejadian.



Sumber: Polda/Polres/Polresta se-Papua Barat

Gambar 4 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang di Papua Barat, 2022

Kelompok kejahatan ketujuh adalah kejahatan terkait narkoba. Kejahatan terkait narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pada tahun 2023, jumlah kejahatan narkoba di Papua Barat tercatat ada sebanyak 78 kasus. Sementara itu, berdasarkan laporan dari Kepolisian Resor di kabupaten, Kabupaten Sorong tercatat memiliki kejahatan terkait narkoba paling tinggi se-Papua Barat yaitu sebanyak 19 kasus diikuti kabupaten Manokwari sebanyak 17 kasus.

Kedelapan, kelompok kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi. Kejahatan ini mencakup kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Papua Barat, kejahatan penipuan/perbuatan curang mendominasi kelompok kejahatan ini. Pada tahun 2023 jenis kejahatan tersebut tercatat sebanyak 300 kejadian. Sementara itu untuk kejahatan penggelapan dan korupsi tercatat masing-masing sebanyak 103 dan 7 kasus kejahatan.

Kelompok kejahatan terakhir adalah jenis kejahatan terhadap ketertiban umum. Secara umum kejahatan jenis ini dapat diartikan sebagai kejahatan yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat

dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Contoh kongkrit kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHP diantaranya adalah penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara; menyatakan permusuhan terhadap pemerintah; menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan tertentu; menghasut di muka umum yang menimbulkan kekacauan. Di provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 145 kejadian kejahatan terkait ketertiban umum sepanjang tahun 2023.

Konflik Massal

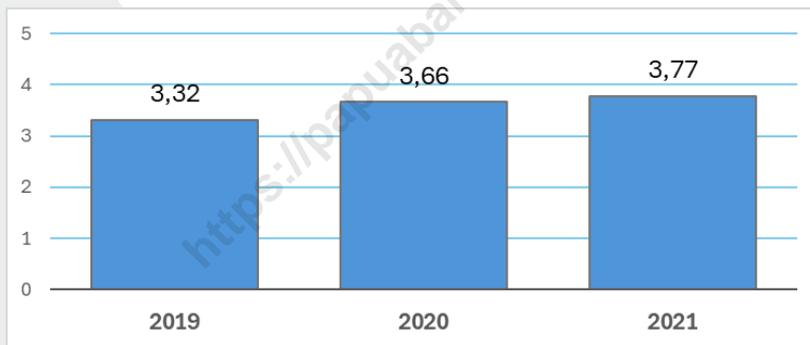
Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai fenomena konflik berupa perkelahian massal yang terjadi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021. Aspek yang dilihat meliputi kejadian perkelahian massal di kabupaten/kota serta upaya penyelesaiannya. Selain dapat dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat mengganggu keamanan.

Secara etimologi konflik berasal dari kata kerja Latin "configere" yang berarti saling memukul (Hafidhuddin, 2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan. Secara terminologi, Soekanto (2005) mendefinisikan pertentangan atau pertikaian (konflik) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

Data yang menjadi sumber utama merupakan data kewilayahan (spasial data) yang diperoleh dari data Statistik Potensi Desa (Podes). Unit observasi dalam pengumpulan data statistik Podes adalah seluruh desa/kelurahan di

wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat dari cakupan jumlah atau persentase desa/kelurahan yang menjadi ajang atau lokasi kejadian tersebut.

Seperti yang disajikan pada Gambar 5 berikut, hasil Podes 2019, 2020, dan 2021 memperlihatkan bahwa jumlah desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2019, desa dengan konflik massal di Papua Barat ada sebanyak 66 desa atau sekitar 3,32 persen dari total desa di provinsi ini. Berikutnya pada tahun 2020 naik menjadi 60 (atau sekitar 3,66 persen) desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal. Sementara hasil Podes 2021 menunjukkan bahwa terjadi sedikit kenaikan jumlah desa/kelurahan dengan konflik massal, yaitu sebanyak 75 desa/kelurahan atau sekitar 3,77 persen dari total desa di Papua Barat.

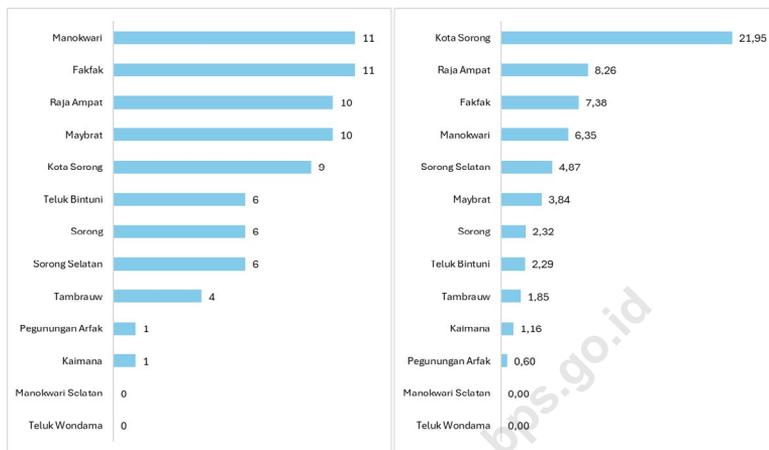


Sumber: BPS, Pendataan Podes 2019, 2020, 2021

Gambar 5 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal di Provinsi Papua Barat, 2019-2021

Apabila kita melihat lebih rinci ke kabupaten/kota, kita dapat melihat variasi jumlah kejadian perkelahian massal. Selama tahun 2021, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan dengan perkelahian massal tertinggi di Papua Barat, yaitu masing-masing sebanyak 11 desa/kelurahan. Sebaliknya, Kabupaten Teluk

Wondama dan Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten dimana desa/kelurahannya tidak pernah terjadi konflik massal sepanjang tahun 2021. Selanjutnya, jika dilihat dari persentasenya, Kota Sorong tercatat sebagai kota dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang pernah terjadi perkelahian



Sumber: BPS, Pendataan Podes 2021

Gambar 6 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

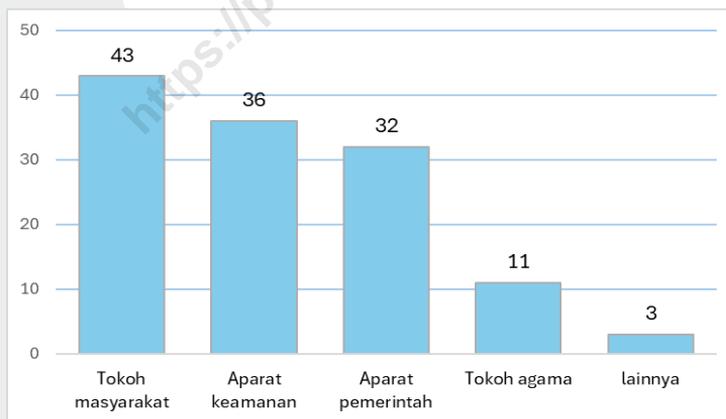
Penyelesaian Tindak Kejahatan

Pemerintah menyadari kerawanan konflik di Indonesia dapat menciptakan perpecahan. Oleh karena itu, sebagai upaya menanggulangi isu konflik pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 2013 tentang penanganan konflik sosial. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Gurr dalam Soetopo (2001) menjelaskan bahwa strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi: (1) konsistensi damai,

yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Gambar 7 berikut memetakan inisiator yang aktif dalam menyelesaikan konflik massal. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa inisiator penyelesaian konflik paling banyak berasal dari tokoh masyarakat (43 desa/kelurahan). Selanjutnya adalah aparat keamanan sebanyak 36 desa/kelurahan dan aparat pemerintah sebanyak 32 desa/kelurahan. Sementara itu, tokoh agama juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik, ada sebanyak 25 desa/kelurahan dimana perkelahian massal dapat diselesaikan oleh tokoh agama.



Sumber: BPS, Pendataan Podes 2021

Gambar 7 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Inisiator Penyelesaian Konflik Massal di Provinsi Papua Barat, 2021

Upaya Menjaga Keamanan

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai upaya dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan desa/ kelurahan tempat tinggalnya dan perkembangannya selama satu dekade terakhir. Data yang digunakan merupakan data kewilayahan (spasial data) dengan unit observasi seluruh desa/ kelurahan yang ada di wilayah Papua Barat (Pendataan Potensi Desa).



Sumber: BPS, Pendataan Podes 2021

Gambar 8 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021

Gambar 8 di atas menyajikan banyaknya desa/kelurahan menurut jenis upaya yang dilakukan warganya untuk menjaga keamanan lingkungan. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan selama tahun 2021 secara berturut-turut adalah melakukan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan (379), pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga (328), pembentukan/pengaturan regu keamanan (281), pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan (258), dan penambahan jumlah anggota hansip/linmas (104).

Gambaran upaya dan partisipasi masyarakat desa dalam menjaga keamanan dirinci menurut kabupaten/kota selama tahun 2021 disajikan pada tabel lampiran. Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa upaya warga untuk menjaga keamanan dengan menerapkan sistem pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan mendominasi hampir di semua kabupaten/kota di Papua Barat. Sementara itu, upaya menjaga keamanan dengan penambahan jumlah anggota hansip/linmas menjadi upaya yang paling sedikit dilakukan di hampir semua kabupaten/kota.

Selain dari aspek warga, upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga merupakan fungsi dari aparat berwenang dalam hal ini adalah polisi. Data Podes menyajikan Desa/kelurahan yang pada wilayahnya terdapat keberadaan pos polisi. Berdasarkan Pendataan Podes tahun 2018, di Provinsi Papua Barat hanya terdapat 113 desa/kelurahan atau setara dengan 5,69 persen dari keseluruhan desa/kelurahan di Papua Barat yang di wilayahnya terdapat keberadaan pos polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda). Artinya, sekitar 94,31 persen desa/kelurahan tidak ada pos polisi. Bahkan, sekitar 56,77 persen diantaranya menyatakan akses ke pos polisi terdekat cenderung sulit dan sangat sulit.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kriminal 2023. Jakarta: BPS.
- Hafidhuddin, Didin. et.al. (2001). Berbangsa dan Bernegara Menurut Islam. Jakarta: Pustaka Zaman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2012). Bandung: Citra Umbara.
- Maslow, A.H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. New York: *Psychological Review*.
- Soetopo, H. (2001). Manajemen Konflik. Malang: Universitas Negeri Malang.
- UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). *International Classification Of Crimes For Statistical Purposes. Version 1.0*.

Catatan Teknis

Sumber Data

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari dua sumber utama, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Data jumlah tindak pidana (*crime total*), jumlah kejadian kejahatan menurut jenis kejahatan, dan jumlah kasus yang diselesaikan bersumber dari Polda Papua Barat, Polres/Polresta se-Papua Barat.
2. Data pendukung lainnya yang meliputi jumlah desa dengan kejadian konflik massal diperoleh dari hasil kegiatan Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021.

Statistik Potensi Desa (Podes)

Potensi Desa (podes) merupakan satu-satunya data berbasis kewilayahan yang dihasilkan oleh BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT) di seluruh Indonesia. Awalnya, Pendataan Podes diselenggarakan setiap tiga tahun atau dua tahun sebelum pelaksanaan sensus. Namun sehubungan dengan semakin mendesaknya kebutuhan data Podes yang terkini, maka sejak tahun 2019 Podes dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Podes). Adapun kegiatan Pendataan Podes dilakukan terakhir pada tahun 2021.

Responden atau narasumber pendataan Podes adalah kepala desa/lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya (seperti sekretaris desa, bendahara, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan). Selain itu, narasumber Podes juga berasal dari unsur lainnya, diantaranya guru, pendeta, dokter, perawat, bidan, kader, dan petugas penyuluh pertanian yang tinggal di dalam wilayah desa/kelurahan serta mengetahui kondisi dan karakteristik di desa/kelurahan.

Awalnya, fungsi utama pendataan Podes adalah menyajikan data atau informasi tentang desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan kegiatan sensus. Namun peran data Podes semakin luas setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Data Podes menjadi data strategis yang digunakan tidak hanya sebagai bahan evaluasi, namun juga perencanaan pembangunan di desa.

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam Podes mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan. Diantaranya adalah fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, masjid, gereja, dan tempat ibadat lainnya, serta sarana atau fasilitas olahraga. Berikutnya adalah fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, supermarket, KUD, sarana transportasi, bank, dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya. Selain itu, Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal baik antarwarga desa maupun antardesa.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan

dengan hal tersebut, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan di bawah ini.

Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Data Polri

a. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. Tindak Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang Dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
3. Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian, adalah:
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - Peristiwa yang telah kadaluarsa

a. Pelaku Kejahatan

Yang dimaksud pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.

- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

a. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

a. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

a. Korban

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Konsep-Konsep Kejahatan dalam Podes

a. Kejahatan/Kriminalitas

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

a. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

Perkelahian antar kelompok masyarakat adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.

Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.

Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.

Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.

Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.

Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.

Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

Penjelasan Teknis

1. Angka Indeks Kejahatan (It)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

Dimana: t_0 = tahun dasar

t = tahun t

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)

Crime Rate =

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

3. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime Clearance*)

Crime Clearance =

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100$$

Lampiran

Lampiran 1 Jumlah Tindak Pidana (*Crime Total*) di Papua Barat, 2020 - 2023

Polda/Polres/Polresta	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	348	215	222	133
Kaimana	196	206	240	305
Teluk Wondama	46	133	79	84
Teluk Bintuni	82	122	202	198
Manokwari	707	405	807	770
Sorong Selatan	157	178	189	111
Sorong	293	279	168	364
Raja Ampat	84	83	151	112
Tambrau	*	*	4	14
Maybrat	6	27	4	37
Manokwari Selatan	22	14	11	119
Pegunungan Arfak	**	**	**	0
Kota Sorong	384	747	88	1 082
Papua Barat	n.a	n.a	268	371
Provinsi Papua Barat	4 156	2 684	3 360	3 700

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Catatan

* : Data masih tergabung dengan Polres Kabupaten Sorong

** : Data masih tergabung dengan Polres Kabupaten Manokwari

Lampiran 2 Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan di Papua Barat,
2020 - 2023

Polda/Polres/Polresta	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	162	113	152	106
Kaimana	165	114	151	199
Teluk Wondama	20	156	42	47
Teluk Bintuni	25	79	140	140
Manokwari	596	293	472	409
Sorong Selatan	61	58	119	82
Sorong	181	145	170	271
Raja Ampat	84	49	119	45
Tambrauw	*	*	3	3
Maybrat	6	5	4	3
Manokwari Selatan	11	14	72	86
Pegunungan Arfak	**	**	**	0
Kota Sorong	57	616	512	834
Papua Barat	n.a	n.a	147	3
Provinsi Papua Barat	1 260	2 626	2 103	2 228

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Catatan

* : Data masih tergabung dengan Polres Kabupaten Sorong

** : Data masih tergabung dengan Polres Kabupaten Manokwari

Lampiran 3 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) di Papua Barat, 2020 - 2023

Polda/Polres/Polresta	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	46,55	52,56	75	79,70
Kaimana	84,18	55,34	36,36	65,25
Teluk Wondama	43,48	100	53,16	55,95
Teluk Bintuni	30,49	64,75	81,82	70,71
Manokwari	84,3	72,35	78,81	53,12
Sorong Selatan	38,85	32,58	101,19	73,87
Sorong	61,77	51,97	62,96	74,45
Raja Ampat	100	59,04	69,31	40,18
Tambrauw	*	*	75	21,43
Maybrat	100	18,52	68,47	8,11
Manokwari Selatan	50	100	62,92	72,27
Pegunungan Arfak	**	**	**	0
Kota Sorong	14,84	82,46	58,49	77,08
Papua Barat	n.a	n.a	54,85	0,81
Provinsi Papua Barat	30,32	97,83	62,59	60,22

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Catatan

* : Data masih tergabung dengan Polres Kabupaten Sorong

** : Data masih tergabung dengan Polres Kabupaten Manokwari

Lampiran 4 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat, 2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	11
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	475
3	Penganiayaan Berat	162
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	108
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	26
6	Pencabulan	32
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	1
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	93
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	426
10	Pencurian dengan pemberatan	288
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	475
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	95
13	Pembakaran dengan Sengaja	7
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	78
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	300
17	Penggelapan	103
18	Korupsi	7
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	145

Sumber: Polda Papua Barat

Lampiran 5 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Fakfak, 2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	1
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	38
3	Penganiayaan Berat	0
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	8
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	4
6	Pencabulan	2
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	8
10	Pencurian dengan pemberatan	0
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	3
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	2
13	Pembakaran dengan Sengaja	0
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	7
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	5
17	Penggelapan	2
18	Korupsi	2
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	0

Sumber: Polres Fakfak

Lampiran 6 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Kaimana, 2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	1
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	81
3	Penganiayaan Berat	0
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	18
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	1
6	Pencabulan	3
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	66
10	Pencurian dengan pemberatan	0
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	12
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	10
13	Pembakaran dengan Sengaja	0
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	4
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	5
17	Penggelapan	7
18	Korupsi	0
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	0

Sumber: Polres Kaimana

Lampiran 7 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Teluk Wondama, 2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	0
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	4
3	Penganiayaan Berat	4
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	2
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	0
6	Pencabulan	0
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	7
10	Pencurian dengan pemberatan	17
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	0
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	0
13	Pembakaran dengan Sengaja	0
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	4
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	12
17	Penggelapan	3
18	Korupsi	0
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	0

Sumber: Polres Teluk Wondama

Lampiran 8 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Teluk Bintuni,
2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	5
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	35
3	Penganiayaan Berat	2
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	5
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	7
6	Pencabulan	0
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	34
10	Pencurian dengan pemberatan	25
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	0
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	8
13	Pembakaran dengan Sengaja	0
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	0
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	30
17	Penggelapan	6
18	Korupsi	0
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	0

Sumber: Polres Teluk Bintuni

Lampiran 9 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Manokwari,
2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	0
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	149
3	Penganiayaan Berat	1
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	9
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	1
6	Pencabulan	5
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	27
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	64
10	Pencurian dengan pemberatan	71
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	162
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	30
13	Pembakaran dengan Sengaja	0
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	17
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	80
17	Penggelapan	28
18	Korupsi	0
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	3

Sumber: Polresta Manokwari

Lampiran 10 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Sorong Selatan, 2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	0
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	25
3	Penganiayaan Berat	0
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	2
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	3
6	Pencabulan	3
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	36
10	Pencurian dengan pemberatan	0
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	3
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	3
13	Pembakaran dengan Sengaja	0
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	0
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	4
17	Penggelapan	0
18	Korupsi	0
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	0

Sumber: Polres Sorong Selatan

Lampiran 11 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Sorong, 2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	2
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	31
3	Penganiayaan Berat	0
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	5
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	2
6	Pencabulan	2
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	9
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	15
10	Pencurian dengan pemberatan	42
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	130
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	6
13	Pembakaran dengan Sengaja	0
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	19
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	22
17	Penggelapan	7
18	Korupsi	0
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	139

Sumber: Polres Sorong

Lampiran 12 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Raja Ampat, 2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	0
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	36
3	Penganiayaan Berat	0
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	6
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	5
6	Pencabulan	5
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	1
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	31
10	Pencurian dengan pemberatan	0
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	0
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	7
13	Pembakaran dengan Sengaja	0
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	6
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	15
17	Penggelapan	6
18	Korupsi	0
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	0

Sumber: Polres Raja Ampat

Lampiran 13 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Tambrau,
2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	0
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	7
3	Penganiayaan Berat	2
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	0
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	0
6	Pencabulan	0
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	0
10	Pencurian dengan pemberatan	0
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	0
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	0
13	Pembakaran dengan Sengaja	0
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	0
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	0
17	Penggelapan	0
18	Korupsi	0
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	0

Sumber: Polres Tambrau

Lampiran 14 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Maybrat, 2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	0
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	20
3	Penganiayaan Berat	4
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	5
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	0
6	Pencabulan	1
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	0
10	Pencurian dengan pemberatan	0
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	0
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	2
13	Pembakaran dengan Sengaja	1
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psicotropika	0
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	0
17	Penggelapan	0
18	Korupsi	1
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	3

Sumber: Polres Maybrat

Lampiran 15 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Manokwari Selatan, 2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	1
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	16
3	Penganiayaan Berat	1
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	2
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	1
6	Pencabulan	3
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	1
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	13
10	Pencurian dengan pemberatan	16
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	0
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	11
13	Pembakaran dengan Sengaja	2
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	0
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	12
17	Penggelapan	3
18	Korupsi	0
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	0

Sumber: Polres Manokwari Selatan

Lampiran 16 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kota Sorong, 2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	0
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	2
3	Penganiayaan Berat	148
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	34
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	2
6	Pencabulan	5
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	48
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	87
10	Pencurian dengan pemberatan	90
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	165
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	11
13	Pembakaran dengan Sengaja	3
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psicotropika	0
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	45
17	Penggelapan	21
18	Korupsi	1
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	0

Sumber: Polresta Sorong

Lampiran 17 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Polda Papua Barat, 2023

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	1
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	31
3	Penganiayaan Berat	0
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	12
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	0
6	Pencabulan	3
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
8	Pencurian dengan Kekerasan	8
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
9	Pencurian	65
10	Pencurian dengan pemberatan	27
11	Pencurian Kendaraan Bermotor	0
12	Pengrusakan/Penghancuran Barang	5
13	Pembakaran dengan Sengaja	1
14	Penadahan	0
Kejahatan Terkait Narkotika		
15	Narkotika dan Psikotropika	21
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
16	Penipuan/Perbuatan Curang	70
17	Penggelapan	20
18	Korupsi	3
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
19	Terhadap Ketertiban Umum	0

Sumber: Polda Papua Barat

Lampiran 18 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/ Kota dan Keberadaan Perkelahian Massal di Wilayahnya di Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	Ada Kejadian Perkelahian Massal		Tidak Ada Kejadian Perkelahian Massa		Jumlah Desa/ Kelurahan	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	11	7,38	138	92,62	149	100
Kaimana	1	1,16	85	98,84	86	100
Teluk Wondama	0	0	76	100	76	100
Teluk Bintuni	6	2,29	255	97,71	261	100
Manokwari	11	6,35	162	93,65	173	100
Sorong Selatan	6	4,87	127	95,13	123	100
Sorong	6	2,32	251	97,68	257	100
Raja Ampat	10	8,26	111	91,74	121	100
Tambrauw	4	1,85	211	98,15	215	100
Maybrat	10	3,84	250	96,16	260	100
Manokwari Selatan	0	0	57	100	57	100
Pegunungan Arfak	1	0,60	165	99,4	166	100
Kota Sorong	9	21,95	32	78,05	41	100
Papua Barat	70	3,53	1915	96,47	1985	100

Sumber: Pendataan Podes 2021

Lampiran 19 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dan Kabupaten/Kota, 2021

Kabupaten/Kota	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan				
	Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan	Pembentukan/pengaturan regu keamanan (persen)	Penambahan jumlah anggota hansip/linmas	Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan (persen)	Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	11	7,38	138	92,62	149
Kaimana	1	1,16	85	98,84	86
Teluk Wondama	0	0	76	100	76
Teluk Bintuni	6	2,29	255	97,71	261
Manokwari	11	6,35	162	93,65	173
Sorong Selatan	6	4,87	127	95,13	123
Sorong	6	2,32	251	97,68	257
Raja Ampat	10	8,26	111	91,74	121
Tambrau	4	1,85	211	98,15	215
Maybrat	10	3,84	250	96,16	260
Manokwari Selatan	0	0	57	100	57
Pegunungan Arfak	1	0,60	165	99,4	166
Kota Sorong	9	21,95	32	78,05	41
Papua Barat	70	3,53	1915	96,47	1985

Sumber: Pendataan Podes 2021

Lampiran 20 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2021

Kabupaten/Kota	Pos Polisi (Termasuk, Polsek, Polres, Polda)		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak Ada	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	7	142	19	62	55	6
Kaimana	10	76	6	18	37	15
Teluk Wondama	7	69	8	23	30	8
Teluk Bintuni	17	245	16	93	99	37
Manokwari	12	161	13	113	34	1
Sorong Selatan	10	113	5	48	35	25
Sorong	12	245	3	66	107	69
Raja Ampat	8	113	2	30	63	18
Tambrauw	4	211	11	44	103	53
Maybrat	4	256	15	125	88	28
Manokwari Selatan	4	53	4	19	25	5
Pegunungan Arfak	2	164	2	18	67	77
Kota Sorong	11	30	5	21	4	0
Papua Barat	108	1 878	109	680	747	342

Sumber: Pendataan Podes 2021

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://papuabarat.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Trikora Sowi IV, Manokwari - Papua Barat, 98315
Telp. Email: bps9100@bps.go.id
Website: papuabarat.bps.go.id

ISSN 2654-9891



9 772654 989000